

BAB II

GAMBARAN UMUM BIDANG SOSIAL POLITIK DAN KEAMANAN KOREA UTARA, SERTA PROFFIL KIM JONG-UN

Korea Utara merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Timur yang perkembangan sosial-politiknya telah melalui serangkaian sejarah yang panjang. Sebelum era kolonisasi Jepang, sebenarnya Korea Utara masih bergabung menjadi satu dengan Korea Selatan mulai dari Dinasti Goryeo, Joseon dan beberapa dinasti sebelumnya sampai dengan era kolonisasi Jepang yang menyebabkan Korea terpecah menjadi dua.

Dalam perkebangannya, Korea Utara menjadi negara dengan sistem politik-pemerintahan yang moderen, dimana terdapat pembagian kewenangan dan kekuasaan, diantaranya kepala negara, parlemen, partai politik dan lain-lainnya, meskipun pada kenyataannya secara konseptual menunjukkan pola otoritarianisme, dimana kepemimpinan terpusat pada posisi kepala negara sebagai *decision maker*. Pada bab II ini akan diuraikan lebih lanjut tentang gambaran bidang sosial, politik dan keamanan.

A. Gambaran Bidang Sosial-Politik

Korea Utara merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Timur yang secara geografis berbatasan dengan Laut Jepang di sebelah Timur, Korea Selatan di sebelah Selatan, Republik Rakyat China (RRC) di sebelah Barat dan Rusia di sebelah Utara. Gambaran wilayah Korea Utara lihat peta 2.1. sebagai berikut :

Peta 2.1. Wilayah Geografis Korea Utara



Sumber : "Maps of North Korean", dalam <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/kp.htm>, diakses pada tanggal 24 September 2017.

Dalam sepanjang sejarah Korea Utara negara ini telah berganti tiga tampuk kepemimpinan. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 21.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Suksesi Kepemimpinan Korea Utara Tahun 1948-2016

No.	Pemimpin Korea Utara	Periode Jabatan
1.	Kim Il-Sung	9 September 1948-8 Juli 1994
2.	Kim Jong-Il	8 Juli 1994-17 Desember 2011
3.	Kim Jong-Un	17 Desember 2011-hingga sekarang (2016)

Sumber : "North Korean Profile", dalam
<http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15258881>, diakses
pada tanggal 24 September 2017.

Melalui tabel di atas maka dapat difahami bahwa sejak tahun 1948 Korea Utara telah berganti masa kepemimpinan sebanyak tiga kali. Masing-masing kepemimpinan tidak dipilih melalui pemilihan umum, namun lebih berdasarkan garis keturunan dan kemudian dilegitimasi melalui pengakuan partai politik hingga pemilihan umum yang menjadikan para pemimpin Korea Utara seolah-olah sebagai pemimpin yang legitimet.

1. Bidang Sosial

Pada tahun 1980 dan 1987, rasio pria banding wanita masing-masing 86,2 banding 100, dan 84,2 banding 100. Rendahnya rasio pria dimungkinkan akibat dari perang, namun figur-figur ini nampaknya lebih rendah dibandingkan rasio 88,3 banding 100 yang direkam tahun 1953, tahun berakhirnya Perang Korea. Rasio pria-wanita berangsur-angsur normal dengan berjalannya tahun, seperti yang terjadi antara tahun 1953 dan 1970, saat angka menunjukkan kenaikan menjadi 95,1 banding 100.²⁴

Setelah 1970, rasio ini menunjukkan kecenderungan menurun. Eberstadt dan Banister memperkirakan bahwa sebelum tahun 1970, figur populasi pria-wanita dihitung secara keseluruhan

²⁴ "North Korean Demography", dalam
http://www.indexmundi.com/north_korea/demographics_profile.html, diakses pada
tanggal 24 September 2017.

dibuktikan dengan tingginya rasio pria yang mencapai 90-an persen. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Central Statistics Bureau, Eberstadt dan Banister memperkirakan jumlah pria yang “tak dihitung” mencapai 1,2 juta pada tahun 1986 dan rasio pria-wanita yang sebenarnya adalah 97,1 banding 100 pada tahun 1990. Jika taksiran mereka benar, berarti 6,1 persen jumlah populasi Korea Utara adalah angkatan militer, yang jika diurutkan menjadi negara dengan angkatan militer terbesar ke-5 di dunia di akhir dekade 80-an (ke-4 pada tahun 2006).²⁵

Jumlah pertumbuhan populasi Korea Utara pada tahun 1960 adalah 2,7 persen, meningkat 3,6 persen pada tahun 1970, lalu turun menjadi 1,9 pada tahun 1975. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya angka fertilitas: angka rata-rata anak yang dilahirkan menurun dari 6,5 pada tahun 1966 menjadi 2,5 pada tahun 1988.

Jika dilihat dari sejarahnya maka angka kelahiran adalah 20,01 kelahiran/1.000 populasi (perkiraan 1991), 17,58 kelahiran/1.000 populasi (perkiraan 1996), 14,61 kelahiran/1.000 populasi (perkiraan 2006), 14,61 kelahiran/1.000 populasi (perkiraan 2008). Sedangkan angka kematian 8,94 ematian/1.000 populasi (perkiraan 1991), 9,52 kematian/1.000 populasi (perkiraan 1996), 7,29 kematian/1.000 populasi (perkiraan 2006) dan 7,29 kematian/1.000 populasi (perkiraan 2008)

Kemudian dilihat dari faktor religius, maka Korea Utara terdiri dari beberapa kepercayaan, yaitu :²⁶

- a. Tidak beragama: 15.460.000 pengikut (64,31% penduduk, mayoritas yang dominan, mereka adalah penghayat filsafat Juche)

²⁵ Ibid.

²⁶ “Religious Beliefs on North Korean”, dalam <http://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-north-korea.html>, diakses pada tanggal 23 September 2017.

- b. Shamanisme Korea: 3.846.000 pengikut (16% penduduk)
- c. Cheondoisme: 3.245.000 pengikut (13,50% penduduk)
- d. Agama Buddha: 1.082.000 pengikut (4,50% penduduk)
- e. Agama Kristen: 406.000 pengikut (1,69% penduduk)

2. Bidang Politik

Korea Utara merupakan Negara yang hanya mengizinkan 1 partai untuk berdiri, yakni Partai Buruh Korea. Pemerintah Korea Utara secara sepihak menyatakan negaranya sebagai Negara Juche. Ideologi “Juche” yang berpaham “Kemandirian Nasional” ini pertama kali diciptakan oleh Kim Il-sung (mantan pemimpin pertama korea utara). Inti dari ideologi ini adalah menerapkan prinsip-prinsip umum *Marxisme* dan *Leninisme* dengan beberapa modifikasi yang dilakukan oleh Kim Il-sung sendiri. Ideologi Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri) sebenarnya telah digunakan oleh Kim Il-sung sejak awal tahun 1955 untuk membentuk berbagai kebijakan, namun baru diakui secara resmi ketika Korea Utara membentuk suatu konstitusi baru pada tahun 1972.²⁷

Korea Utara dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya di Semenanjung Korea di bagian utara dan salah satu negara yang menganut negara satu partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea dengan dua partai kecilnya yaitu Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois yang memiliki hak untuk mengajukan calon untuk menempati dan memegang posisi baik di pemerintahan maupun di Majelis Tertinggi Rakyat. Dalam bidang ekonomi, negara ini

²⁷ “Sistem Pemerintahan di Korea Utara”, dalam <http://bahasa-korea.com/sistem-pemerintahan-di-korea-utara.htm>, diakses pada tanggal 26 September 2017.

termasuk ke dalam salah satu negara yang menganut kebijakan bahwa negara merupakan pemilik ekonomi dan direncanakan sepenuhnya oleh pemerintah serta membatasi pelaksanaan perdagangan internasional melalui kebijakan isolasinya sehingga menjadi salah satu negara yang paling tertutup didunia.²⁸

Pemerintahan oleh satu partai adalah ciri khas yang bisa ditemukan di sebagian besar negara sosialis di masa lalu. Partai berkuasa yang memusatkan ideologi menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional, dimana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif dan yudikatif secara keseluruhan. Partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, Korea Utara bisa dikatakan sebagai ‘negara yang dipimpin partai’, walaupun ada lebih dari satu partai, namun mereka bukan kubu oposisi, tetapi mitra partai yang berkuasa. Partai berkuasa di Korea Utara adalah Partai Buruh Korea.²⁹

Partai memimpin negara, dan ketuanya memimpin partai. Itulah prinsip dasar pelaksanaan sistem rejim Korea Utara secara keseluruhan. Sidang Rakyat Tertinggi, sebagai wakil rakyat umum, merupakan wadah dimana partai melaksanakan keputusannya. Oleh karena itu, Sidang Rakyat Tertinggi adalah lembaga politik tertinggi di Korea Utara. Sidang Rakyat Tertinggi melantik pejabat utama pemerintahan seperti pemimpin untuk melakukan tugas administrasi secara nyata. Karena, secara prinsip, kekuatan tidak terkonsentrasi pada presiden atau kabinet, maka sistem itu bisa dianggap sebagai ‘Sistem Sidang Rakyat’

²⁸ Ibid.

²⁹ “Ringkasan Ciri Khas Rezim Korea Utara”, dalam <http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/politics/summary.htm?lang=i>, diakses pada tanggal 23 September 2017.

seperti Uni Soviet dan Cina yang mengikuti sistem tersebut.³⁰

Walaupun Sidang Rakyat Tertinggi adalah lembaga politik tertinggi di Korea Utara, namun Sidang Rakyat dipimpin oleh ketua partai. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan nama jabatan yang diberikan kepada ketua itu, dia adalah pemimpin de facto yang memiliki wewenang tertinggi dan melaksanakan segala bentuk kekuasaan secara langsung di seluruh sektor termasuk politik, pertahanan, diplomatik, keamanan nasional, ekonomi, industri, perdagangan, sosial, budaya dan seni.

Di bawah kepemimpinan Kim Jong-il, sejak tahun 1994, Korea Utara menjadi negara yang berusaha hidup tanpa bantuan negara lain dengan kata lain bahwa Kim Jong-il menekankan bahwa Korea Utara harus bergerak dengan prinsip berdikari. Politik yang dibangun tersebut membuat kehidupan masyarakat Korea Utara pada umumnya harus menerima kenyataan hidup dengan pertumbuhan ekonomi negara yang rendah. Keadaan ekonomi negara tersebut membuat rakyat Korea Utara hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, kondisi tersebut diperparah dengan kondisi sempitnya lahan pertanian serta lapangan pekerjaan yang terbatas. Namun, ironisnya para pemimpin Korea Utara tersebut hidup dalam kemewahan dan kecukupan bahkan dapat dengan bebas menikmati barang-barang impor dan mewah. Tapi keadaan tersebut sepertinya tertutupi dengan gaya kepemimpinan Kim Jong-il, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berupa propaganda-propaganda oleh pemerintah, bahkan masyarakatnya yakin bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin terbaik yang mampu menyatukan Korea Utara sehingga masyarakat Korea Utara menghormati dan menyembah pemimpin negaranya.

³⁰*Ibid.*

Gaya kepemimpinan Kim Jong-il dalam memimpin Korea Utara sama dengan gaya kepemimpinan mediang ayahnya, Kim Il Sung, dengan menempatkan diri menjadi seorang pemimpin yang terhormat, memimpin Korea Utara dengan gaya otoriter dan diktatornya serta mengedepankan kekuatan militer negara di atas segala-galanya, membangun persenjataan secara besar-besaran seperti halnya senjata nuklir, maupun dengan tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan represif bagi lawan-lawan politiknya dan rakyatnya yang menentang kebijakan politik pemerintah.

B. Gambaran Bidang Keamanan

Korea Utara memiliki angkatan darat terbesar kelima di dunia, diperkirakan sebesar 1,21 juta personel, dengan kira-kira 20% pria berusia 17–54 tahun di dalam angkatan darat. Korea Utara memiliki persentase personel militer per kapita tertinggi di dunia, dengan sekitar 1 serdadu terdaftar untuk setiap 25 warga negara. Hingga tahun 2016 gambaran kekuatan militer Korea Utara dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Kekuatan Militer Korea Utara Tahun 2015

No.	Kategori	Jumlah
1.	Personel aktif	1.000.000 personel
2.	Tank	3.500 buah
3.	Artileri	21.100 unit
4.	Kapal Selam	72 unit
5.	Freegat	3 unit
6.	Pesawat tempur	523 unit

Sumber : “Perbandingan Militer Dua Korea”, dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/05/ingin-tahu-perbandingan-kekuatan-militer-dari-dua-korea>, diakses pada tanggal 23 September 2017.

Dengan jumlah tentara reguler 700.000 orang, dan hampir 4,5 juta tentara cadangan, hampir seperlima rakyat Kore Utara berbakti dalam militer. Semua pria di negara komunis itu wajib mengikuti pendidikan militer dalam bentuk apapun. Dengan demikian, militer Korea Utara dari segi jumlah dua kali lebih besar daripada Korea Selatan. Kemudian menurut Global Firepower Index 2017, Korea Utara punya banyak alat utama sistem pertahanan berupa 76 kapal selam, 5.025 panser, serta 458 jet tempur. Foto dari 2013 ini menunjukkan pemimpin Kim Jong Un di pusat komando militer. Dari tempat ini ia bisa memerintahkan persiapan peluncuran roket yang sebagian bisa dimuati hulu ledak nuklir, untuk menyerang AS dan Korea Selatan.³¹ (gambaran sumber daya nuklir dan personel Korea Utara lihat lempiran 1 dan 2)

Strategi militer Korea Utara dirancang untuk menyusupkan agen dan menyabotase di belakang barisan musuh pada saat perang. Tentara Rakyat Korea memiliki berbagai perlengkapan, meliputi 4.060 tank, 2.500 APC, 17.900 artileri (termasuk mortir), 11.000 senjata pertahanan udara, 915 kapal perang, dan 1.748 pesawat tempur. Perlengkapan yang ada merupakan sisa-sisa Perang Dunia II, umumnya teknologi Perang Dingin yang terproliferasi, atau senjata Soviet.

Korea Utara juga menjual misil balistik dan peralatan militernya ke berbagai negara. Pada April 2009, PBB menyebut Perusahaan Perdagangan Pembangunan dan Pertambangan Korea (alias KOMID) sebagai agen penjual utama Korea Utara dan pengeksport terbesar misil balistik dan senjata konvensional. PBB juga menyebut Korea Ryonbong sebagai penyokong penjualan segala hal yang berhubungan dengan militer Korea Utara.

Korea Utara maka negara ini dilaporkan telah melakukan uji coba sistem pertahanan udara terbaru mereka. Uji coba ini, menurut laporan media pemerintah Korut,

³¹ “Seberapa Besar Kekuatan Militer Korea Utara”, dalam <http://www.dw.com/id/seberapa-besar-kemampuan-militer-korea-utara/g-39567433>, diakses pada tanggal 23 September 2017.

KCNA, disaksikan langsung oleh Kim Jong-un. KCNA melaporkan, Jong-un langsung memerintahkan produksi secara massal sistem pertahanan udara tersebut, dan menyebarkannya di seluruh wilayah Korut, khususnya di wilayah perbatasan, tidak lama setelah Jong-un menyaksikan uji coba itu. Sistem senjata ini, yang kemampuan operasinya telah diverifikasi secara menyeluruh, harus diproduksi secara massal untuk ditempatkan di seluruh negeri, sehingga benar-benar merusak impian liar musuh untuk menguasai wilayah udara.³²

Keberadaan Korea Utara sebagai ancaman hubungan Jepang dan Amerika Serikat juga dapat dilihat dari sistem persenjataan konvensional seperti artileri. Saat ini negeri komunis itu memiliki 21.000 senjata artileri berat jarak jauh yang sebagian besar berdaya jelajah tinggi dan mampu mencapai ibukota Korsel, Seoul. Kemudian terlepas dari jumlah serdadu dan artileri, ancaman terbesar yang dimiliki militer Korea Utara adalah sistem peluru kendali berhulu ledak nuklir. Dikembangkan sejak dekade 1970an dengan mengandalkan desain rudal Scud, Korut kini memiliki tiga tipe peluru kendali yang salah satunya berdaya jelajah 8000 kilometer. Dengan Taepodong 2 Pyongyang bisa menghantam Kanada, Eropa dan Amerika Serikat.³³

Keberadaan bidang militer dan pertahanan Korea Utara sebagai ancaman bagi stabilitas regional juga tidak lepas dari isu sumber daya nuklir yang dimilikinya. Jika dikaitkan dengan berkembangnya sumber daya nuklir Korea Utara maka ini merupakan bagian dari proliferasi nuklir untuk meningkatkan kapasitas kekuatan militer dalam negeri Korea Utara. Salah satu kepentingan yang dipertahankan negara adalah kepentingan dalam bidang militer. Dalam hal kepentingan militer ini, tujuan dan fungsinya berkaitan erat

³² “Korut Ujicoba sistem Pertahanan Baru”, dalam <https://international.sindonews.com/read/1208680/40/disaksikan-jong-un-korut-ujicoba-sistem-pertahanan-udara-baru-1495948610>, diakses pada tanggal 20 September 2017.

³³ *Ibid.*

dengan keamanan nasional, yakni untuk melindungi negara dari ancaman eksternal. Kapabilitas militer merupakan sebuah fondasi kekuatan negara untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar negara tersebut. Kapabilitas militer ini tergantung dari kualitas dan kuantitas dari angkatan bersenjata. Dalam bidang militer terdapat dua tipe senjata yang digunakan, yaitu senjata konvensional dan senjata bukan konvensional. Tipe senjata bukan konvensional dibagi menjadi senjata kimia/ biologi dan senjata nuklir/ termonuklir. Isu pengembangan (proliferasi) nuklir adalah salah satu masalah yang diatur oleh hukum internasional berupa pakta atau perjanjian.³⁴

Aplikasi teknologi nuklir Korea Utara dalam angkatan bersenjata (militer) menghasilkan dua tipe senjata nuklir, yakni strategis dan taktis. Senjata strategis adalah bom dan rudal (misil) yang menjadi instrumen perlindungan utama suatu negara. Senjata taktis merupakan senjata nuklir yang dirancang untuk keperluan peperangan. Senjata nuklir memiliki beberapa karakteristik yaitu memiliki kekuasaan destruktif yang lebih besar daripada sekedar senjata konvensional. Efek penghancurannya lebih beragam dari senjata konvensional yang mempunyai kecepatan dan tingkat akurasi yang tinggi sehingga dapat mencapai tempat yang sangat jauh sesuai program. Selain itu, senjata nuklir juga memerlukan tenaga pelaksana yang jauh lebih kecil dari senjata konvensional. Keunikan senjata nuklir adalah tidak adanya pertahanan efektif untuk melawannya. Perkembangan senjata nuklir (*nuclear weapons proliferation*) dapat dibagi dua, yakni proliferasi horizontal dan proliferasi vertikal. Proliferasi horizontal adalah penyebaran senjata nuklir kepada negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki senjata tersebut. Proliferasi vertikal adalah peningkatan persediaan senjata nuklir oleh negara pemiliknya atau penambahan lokasi persenjataan nuklir di luar wilayah sebelumnya.³⁵

³⁴ “North Korean Nuclear Programe”, dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11813699>, diakses pada tanggal 8 Desember 2017.

³⁵ Ibid.

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Korea Utara merupakan negara dengan sistem politik-pemerintahan yang moderen, dimana terdapat fungsi kepala negara, partai politik hingga parlemen. Meskipun demikian Korea Utara tumbuh sebagai negara yang cendeurng tertutup, yang kemudian menyebabkan ketertinggalan secara ekonomi bagi Korea Utara terhadap negara lain, khususnya Korea Selatan. Hal yang kontras justru terjadi pada bidang pertahanan/keamanan, dimana Korea Utara sangat fokus terhadap pengembangan alutsista termasuk misil antar benua dan senjata berhulu ledak nuklir sebagai wujud impresifisme terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuhnya.

Dinamika sosial-politik dan keamanan Korea Utara, khususnya pada periode 2011-2016 ternyata tidak lepas dari figus kepemimpinan Kim Jong-Un yang menjalankan berbagai kebijakan otoritarian, diantaranya penyingkiran pihak-pihak oposisi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga tindakan-tindakan kontra demokrasi. Gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada pembahasan bab selanjutnya (bab III).